

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# 2025



**Disusun oleh:**  
Dinas Perhubungan  
Kabupaten Jombang



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada *stakeholder* mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih baik lagi, serta memperbaiki kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di tahun yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Jombang, Maret 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JOMBANG**



**SUGIANTO, S.Sos.**

Pembina

NIP. 19740414 199302 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Isu Strategis .....	3
1.4 Cascading Kinerja .....	4
1.5 Peta Proses Bisnis.....	5
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
2.1 Rencana strategis dan Rencana Kinerja .....	7
2.1.1 Rencana Strategis.....	7
2.1.1 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .....	12
3.1.2 Analisis Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun Tahun Sebelumnya .....	17
3.1.3 Analisis Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah .....	24
3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Propinsi/Nasional/Internasional .....	31
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan.....	34
BAB IV .....	45
PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Upaya-upaya dimasa mendatang.....	45

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2025 .....	10
<b>Tabel 2</b> Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Layanan Transportasi Darat Tahun 2025 .....	12
<b>Tabel 3</b> Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2025 .....	13
<b>Tabel 4</b> Perbandingan Target dan Realisasi dari Sasaran Program Tahun 2025 .....	14
<b>Tabel 5</b> Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan dua tahun sebelumnya .....	17
<b>Tabel 6</b> Analisis Capaian dan Realisasi Sasaran Program Tahun 2025 dengan dua tahun sebelumnya .....	19
<b>Tabel 7</b> Capaian Realiasi PK dan Tingkat Kemajuan Sasaran Strategis Sesuai Target Renstra 2025-2029 .....	24
<b>Tabel 8</b> Analisis Capaian Realiasi PK dan Tingkat Kemajuan Sasaran Strategis Sesuai Target Renstra 2025-2029 .....	26
<b>Tabel 9</b> Perbandingan Capaian Realisasi Strategis Kinerja Kabaupaten Jombang, Provinsi, dan Nasional .....	31
<b>Tabel 10</b> Analisis Keberhasilan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Perhubungan .....	34
<b>Tabel 11</b> Analisis Keberhasilan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan .....	37
<b>Tabel 12</b> Analisis Keberhasilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif .....	39
<b>Tabel 13</b> Capaian Komponen Pembentuk .....	40
<b>Tabel 14</b> Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Tahun 2025	41

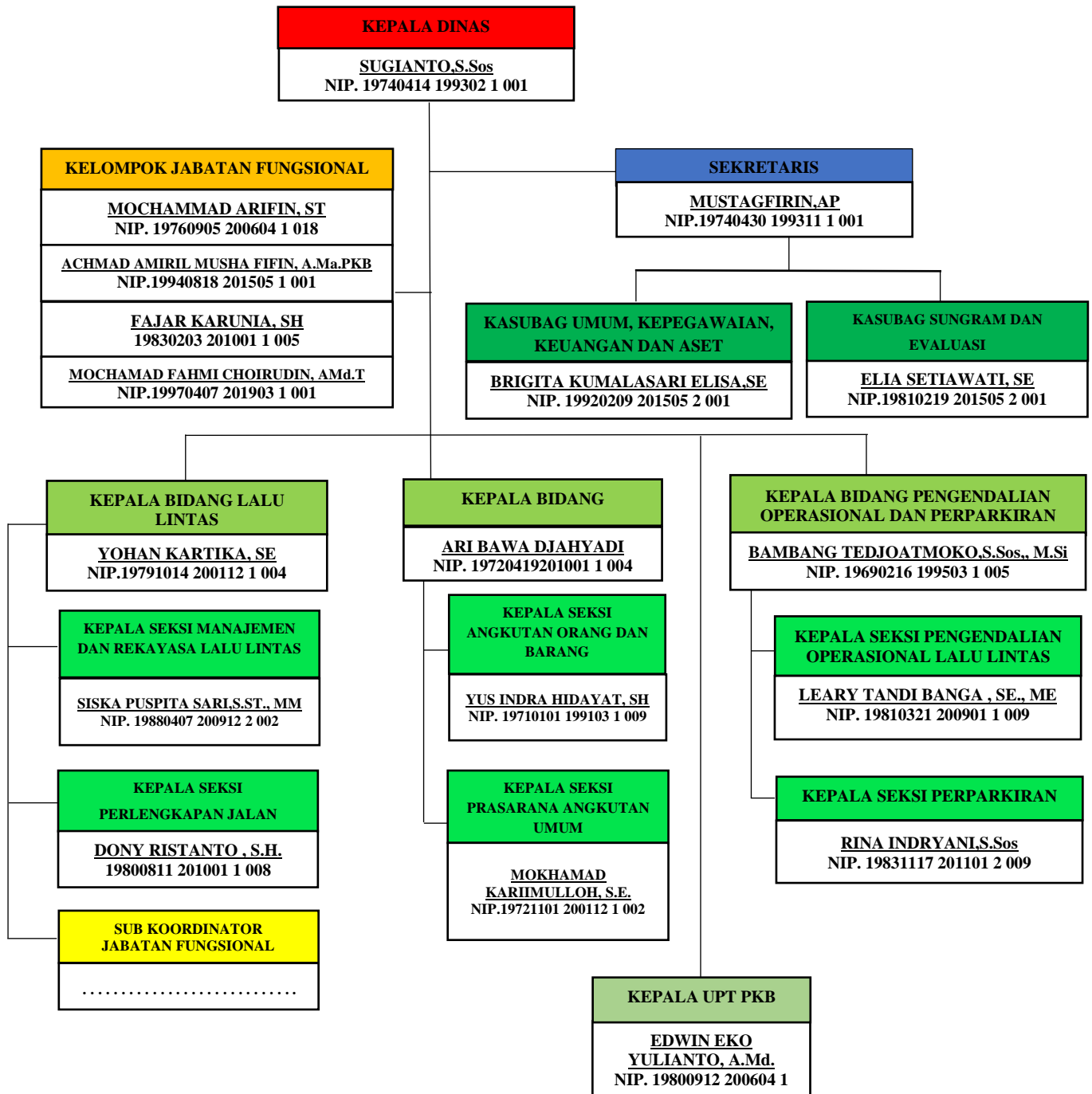
## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang .....	1
<b>Gambar 2</b> Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.....	5
<b>Gambar 3</b> Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang .....	7

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, maka susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1** Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang No 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di bidang perhubungan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki satu sekretariat dan 3 (tiga) bidang sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Jombang No 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- a. Sekretariat. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi
- b. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas serta analisis dampak lalu lintas dan perlengkapan jalan
- c. Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan orang dan barang, serta prasarana angkutan umum
- d. Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan perparkiran

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mempunyai 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

- a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

### **1.3 Isu Strategis**

Dari pendekatan permasalahan nyata di lapangan, potensi daerah yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sebagai modal mempercepat pembangunan yang adil dan merata dan tren lingkungan dinamis (global, nasional, regional), dapat ditarik isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yaitu.:

1. Masih rendahnya cakupan penerangan jalan umum di Kabupaten Jombang yang berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, serta kurangnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
2. Menurunnya kepatuhan pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban uji berkala (Uji KIR) berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan pencemaran udara, serta menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan.
3. Belum tersedianya fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang mandiri di Kabupaten Jombang berdampak pada keterbatasan akses layanan uji berkala, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap uji emisi dan keselamatan.
4. Kurangnya penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di Kabupaten Jombang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, sehingga diperlukan transformasi pengelolaan perlengkapan jalan berbasis data dan teknologi guna meningkatkan keselamatan, efektifitas pelayanan dan kualitas lingkungan hidup.
5. Pengelolaan perparkiran yang belum maksimal ditandai belum terpenuhinya pelayanan perparkiran di 28 ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang, berpotensi menyebabkan kemacetan, polusi udara dan kurang nyamannya masyarakat sebagai pengguna jalan, sehingga diperlukan sistem pengelolaan perparkiran yang efisien dan transparan. Serta belum siapnya infrastruktur pengganti area khusus parkir barang yang berpotensi menyebabkan kemacetan, menurunnya kenyamanan masyarakat, sehingga diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur pengganti area khusus parkir.

#### 1.4 Cascading Kinerja

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Dalam dokumen perencanaan tersebut, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian **Tujuan ke-3**, yaitu meningkatkannya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung **Sasaran ke-8**, yaitu meningkatkannya pelayanan infrastruktur perhubungan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan serta dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran menjadi penjabaran lebih operasional dari tujuan sehingga memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja organisasi.

Dalam proses perencanaan strategis, sasaran memiliki peran penting sebagai arah dan fokus pencapaian kinerja organisasi. Sasaran ditetapkan melalui perumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur. Dengan demikian, penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan pembangunan serta menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu **Meningkatkan Pelayanan Perhubungan** dengan indikator **Indeks Kualitas layanan Transportasi Darat**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menetapkan sasaran strategis yang menjadi fokus capaian kinerja organisasi. Sasaran strategis tersebut meliputi:

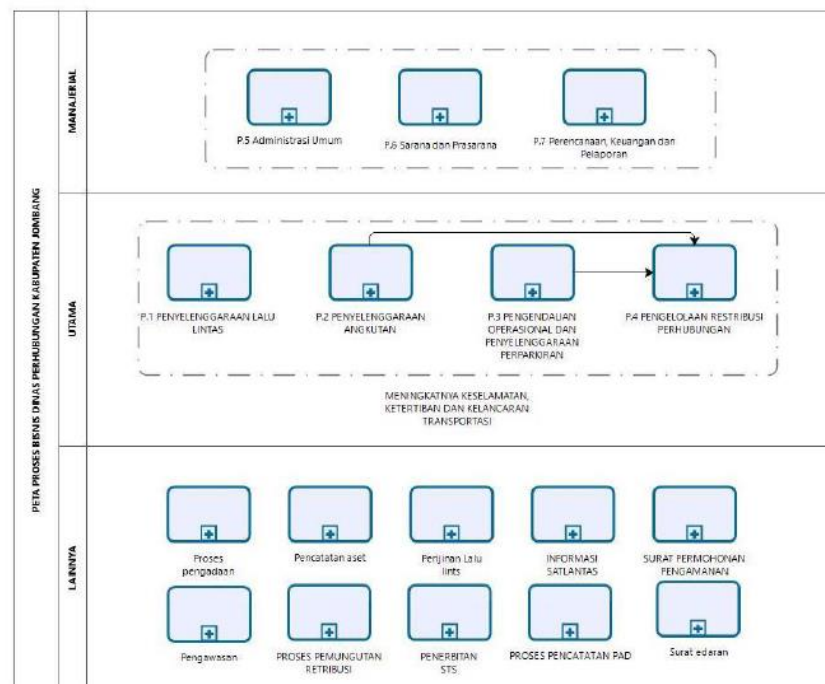
1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan dengan indikator Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan dan Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi.
2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi

### 1.5 Peta Proses Bisnis

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut:



## 1 PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JOMBANG



**Gambar 2** Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

## **1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi**

Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 000.8.6/10016/415.10/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 tersebut adalah 77.45 dengan kategori (BB/Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen pendukung Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dipantau di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang akan dijelaskan lebih detail dan terperinci di tabel 13 dan tabel 14 pada Bab III.

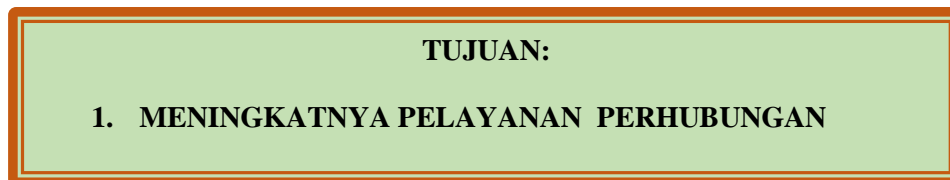
## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembangunan infrastruktur pendukung daya saing dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan pada Kabupaten Jombang. Perubahan tatanann global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

#### 2.1 Rencana strategis dan Rencana Kinerja

##### 2.1.1 Rencana Strategis



**Gambar 3** Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, maka sasaran strategis yang dicapai adalah :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan perhubungan
2. Terwujudnya tata Kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase kehandalan layanan intfrastruktur perhubungan
2. Persentase aksesabilitas layanan transportasi
3. Indeks reformasi birokrasi

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
  - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.5.2 Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
  - 1.6.2 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
  - 1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - 2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - 2.1.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
    - 2.1.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - 2.1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

- 2.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - 2.2.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- 2.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - 2.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - 2.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - 2.4.1 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 2.4.2 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
  - 2.4.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten.Kota
  - 2.5.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - 2.5.2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 2.6 Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
  - 2.6.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- 2.7 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - 2.7.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemanfaatan unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.8 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.8.1 Pengendalian dan Pengawasan dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- 2.1.1 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana kinerja 2025.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 1** Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUNAN</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Indeks Kualitas layanan transportasi darat	3,3542
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan	Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan	61,68%
		Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi	52,38%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	72,85

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(5)	(6)	(7)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Rp. 35.156.987.632	APBD
Program pengelolaan perkeretaapian	Rp. 744.685.000	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 16.084.618.911	APBD

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang*

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

**Tabel 2** Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Layanan Transportasi Darat Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
TUJUAN 3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	14	Indeks kualitas layanan transportasi darat	3.3542	3.5576	106%
Sasaran 8. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perhubungan					

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang*

Berdasarkan target RPJMD Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berhasil mencatatkan kinerja Sangat Tinggi pada indikator utama layanan publik. Hal ini dapat kita lihat dari rencana target yang semula 3,3542 dan mampu direalisasikan menjadi 3,5576 dengan capaian 106% (melampaui target).

Hal ini membuktikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 6%, yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perhubungan berjalan lebih cepat dan efektif dari yang direncanakan. Realisasi angka 3,5576 mengonfirmasi bahwa masyarakat merasakan perbaikan nyata pada kualitas sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Jombang. Capaian ini secara langsung mendukung perwujudan misi daerah dalam menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Secara umum, sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perhubungan telah Tuntas dan Berhasil. Kinerja ini perlu dipertahankan melalui konsistensi pemeliharaan infrastruktur dan inovasi pelayanan pada tahun anggaran berikutnya.

**Tabel 3** Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Indeks Kualitas layanan transportasi darat	3,3542	3,3558	100%
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan	Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan	61,68%	61,68%	100%
		Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi	52,38%	52,40%	100%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	72,85	77,45	106%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Secara kolektif, Dinas Perhubungan telah berhasil memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2025. Dari empat indikator kinerja utama, seluruhnya mencapai nilai 100% bahkan lebih, yang menunjukkan komitmen kuat dalam pelayanan publik dan tata kelola organisasi.

Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Transportasi Darat (Sasaran 1 ) berhasil mencapai 100%. Hal ini menunjukkan standar pelayanan minimal yang dijanjikan kepada masyarakat telah terpenuhi dengan baik sesuai target tahunan.

Pada indikator persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan (Sasaran 2) berhasil mencapai target tepat di angka 61,68%. Sedangkan pada indikator Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi berhasil direalisasikan sebesar 52,40% (dari target 52,38%). *Sehingga dapat disimpulkan bahwa* Masyarakat telah mendapatkan kemudahan akses transportasi dan jaminan infrastruktur yang berfungsi optimal sesuai rencana kerja.

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Sasaran 3) berhasil Mencapai 106%, dengan Realisasi 77,45 dari target 72,85. Ini merupakan pencapaian tertinggi di dalam laporan ini. Dinas Perhubungan berhasil melampaui target dalam menciptakan birokrasi yang lebih bersih dan efektif. Hal ini mencerminkan adanya inovasi internal dan peningkatan disiplin kerja yang signifikan.

**Tabel 4** Perbandingan Target dan Realisasi dari Sasaran Program Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan perhubungan	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi baik	78.81%	78.81%	100%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan manajemen dan pengendalian lalu lintas	44.88%	44.88%	100%
			Persentase peningkatan kualitas prasarana dan keselamatan transportasi jalan	56.97%	56.46%	99%
			Persentase peningkatan dukungan keselamatan	56.22%	57.22%	100%

			dan keteraturan transportasi jalan			
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73.6	73.6	100%

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang*

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan menunjukkan performa kinerja yang stabil dan akuntabel. Dari seluruh indikator program yang dijalankan, mayoritas berhasil mencapai target tepat sasaran (100%), mencerminkan perencanaan yang matang dan eksekusi program yang presisi.

Pada Capaian Urusan Bidang Perhubungan (Sasaran 1) dapat diketahui bahwa indikator Persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi baik mencapai target 100% (Realisasi 78,81%). Ini menunjukkan komitmen penuh pada perlindungan masyarakat di titik-titik rawan kecelakaan kereta api. Sektor indikator Persentase peningkatan manajemen dan pengendalian lalu lintas telah mencapai target 100%. Bahkan pada indikator Persentase peningkatan dukungan keselamatan dan keteraturan transportasi jalan (57,22%) sedikit melampaui target awal (56,22%). Terdapat deviasi sangat kecil (1%) pada indicator Persentase peningkatan kualitas prasarana dan keselamatan transportasi jalan dengan capaian 99%. Hal ini merupakan catatan teknis yang tetap masuk dalam kategori kinerja sangat baik.

Pada Capaian Tata Kelola Pemerintahan (Sasaran 2) dapat diketahui Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah mencapai target 100% dengan angka 73,6. Pencapaian ini membuktikan bahwa Dinas Perhubungan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik (jalan/kereta api), tetapi juga memiliki sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja birokrasi yang efektif serta transparan.

Upaya upaya yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya target kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan persentase infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang berfungsi dengan baik
2. Meningkatkan persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi dengan baik
3. Meningkatkan persentase kelancaran arus lalu lintas
4. Meningkatkan persentase angkutan orang dan barang yang laik jalan
5. Meningkatkan nilai evaluasi AKIP perangkat daerah

### 3.1.2 Analisis Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun Tahun Sebelumnya

**Tabel 5** Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan dua tahun sebelumnya

Tahun 2023				Tahun 2024			Tahun 2025		
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,74	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	77,81	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Indeks Kualitas layanan transportasi darat	3,3558
2	Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas	Persentase Pemenuhan Fasilitas Perhubungan Yang berfungsi baik	89,98%	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perhubungan	Nilai Rata-rata penyediaa n sarana prasarana pendukung transportasi	77,14%	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan	Persentase Kehandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan	61,68%
3	Meningkatnya Keselamatan berlalu lintas	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	5,33%		V/C Ratio	0,36		Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi	52,40%
4							Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	77,45

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Secara garis besar, selama periode 2023 hingga 2025, Dinas Perhubungan terus mengalami penyesuaian dan penajaman terhadap Sasaran Strategis (SS) serta Indikator Kinerja Utama (IKU).

- Tahun 2023 & 2024 Fokus utama terletak pada penguatan internal (akuntabilitas kinerja/SAKIP/AKIP), pemenuhan fasilitas fisik infrastruktur lalu pendukung lalu lintas dan perhubungan, serta aspek keselamatan jalan.
- Tahun 2025: Terjadi reorientasi atau penajaman indikator yang lebih berorientasi pada dampak langsung masyarakat (outcome-based), yaitu berfokus pada kualitas layanan transportasi darat, aksesibilitas umum, keandalan infrastruktur, serta tata kelola birokrasi.

### 1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, kebijakan dinas menitikberatkan pada tata kelola internal organisasi dan pemenuhan infrastruktur keselamatan dasar:

- Akuntabilitas Instansi: Capaian Nilai Evaluasi SAKIP berada di angka 80,74. Angka ini menunjukkan kinerja administrasi dan akuntabilitas program yang sudah masuk dalam kategori sangat baik.
- Infrastruktur Lalu Lintas: Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi dengan baik mencapai 89,98%. Hal ini mencerminkan tingginya efektivitas pemeliharaan fasilitas jalan dan perlengkapan lalu lintas di lapangan.
- Keselamatan Jalan: Indikator persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas terealisasi sebesar 5,33%.

### 2. Capaian Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 menandai fase transisi di mana beberapa sasaran strategis digabungkan dan diperluas cakupannya:

- Akuntabilitas & Kinerja Perangkat Daerah: Nilai Evaluasi AKIP tercatat sebesar 77,81. Meskipun mengalami sedikit penyesuaian dari tahun sebelumnya, nilai ini tetap menjaga standar kepatuhan tata kelola yang tinggi.
- Kualitas Layanan & Infrastruktur Perhubungan: Sasaran ini diukur menggunakan dua indikator makro:
  1. Nilai Rata-rata Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Transportasi: Terealisasi sebesar 77,14%, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keandalan fasilitas publik.
  2. V/C Ratio (Volume to Capacity Ratio): Berada di angka 0,36. Angka ini berkisar jauh di bawah target kritis (1,0), yang berarti kondisi arus lalu lintas secara umum di wilayah pemantauan masih sangat lancar dan kapasitas jalan masih sangat memadai menampung volume kendaraan.

### 3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun penajaman program (restrukturisasi indikator) agar sejalan dengan arah kebijakan pelayanan publik yang lebih prima dan reformis:

- Peningkatan Pelayanan Perhubungan: Diukur dengan Indeks Kualitas Layanan Transportasi Darat yang mencapai 3,3558. Angka indeks ini mencerminkan kepuasan pengguna jasa dan standarisasi layanan moda darat yang berjalan optimal.
- Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan: Dijabarkan ke dalam dua pemenuhan akses:
  1. Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan: Terealisasi sebesar 61,68%.
  2. Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi: Terealisasi sebesar 52,40%. Kedua angka ini menjadi basis evaluasi penting untuk peningkatan cakupan layanan di tahun anggaran berikutnya.
- Tata Kelola Birokrasi: Memunculkan sasaran baru yang bersifat mutakhir, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,45. Angka ini menunjukkan keseriusan Dinas dalam menjalankan akselerasi reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.

**Tabel 6** Analisis Capaian dan Realisasi Sasaran Program Tahun 2025 dengan dua tahun sebelumnya

TAHUN 2023				
NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Presentase fasilitas perhubungan yang dibangun	14,1%
			Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas	6,97%

TAHUN 2024				
NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Presentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	94,51%
			Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas	7,99%
3	Meningkatnya sarana prasarana penunjang keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api	Program pengelolaan perkeretaapian	Persentase fasilitas perlintasan sebidang kereta api yang sesuai kriteria keselamatan yang optimal	51,09%
TAHUN 2025				
NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan perhubungan	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi baik	78,81%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan manajemen dan pengendalian lalu lintas	44,88%
			Persentase peningkatan kualitas prasarana dan keselamatan transportasi jalan	56,46%

			Persentase peningkatan dukungan keselamatan dan keteraturan transportasi jalan	57,22%
3	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73,6

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang*

Secara umum, kinerja program tahun 2023–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada pelayanan perhubungan, keselamatan transportasi, dan tata kelola pemerintahan.

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja aparatur mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi dan dukungan pelayanan internal berjalan dengan baik.

Pada tahun 2025, fokus program diarahkan pada peningkatan tata kelola birokrasi melalui nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan capaian 73,6. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja organisasi sudah berjalan cukup baik, namun harus dilakukan perbaikan di seluruh komponen meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja..

#### 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada tahun 2023, pembangunan fasilitas perhubungan masih relatif rendah dengan capaian 14,1%. Namun upaya penurunan pelanggaran lalu lintas sudah menunjukkan hasil dengan capaian 6,97%.

Pada tahun 2024, kondisi fasilitas perhubungan yang berfungsi baik meningkat menjadi 94,51%. Terdapat perbedaan formulasi pada indikator pembangunan fasilitas perhubungan yang mana dalam indikator ini yang dimasukkan adalah jumlah pembangunan fasilitas perhubungan, sedangkan pada tahun 2024, dengan formulasi yang baru yaitu dengan memasukkan fasilitas perhubungan yang sudah dibangun pada tahun-tahun

sebelumnya menjadi salah satu komponen perhitungan. Selain itu, penurunan pelanggaran lalu lintas juga meningkat menjadi 7,99%.

Pada tahun 2025, program lebih difokuskan pada peningkatan manajemen lalu lintas, keselamatan transportasi jalan, dan dukungan keselamatan transportasi dengan capaian:

- a. peningkatan manajemen dan pengendalian lalu lintas sebesar 44,88%;
- b. peningkatan kualitas prasarana dan keselamatan transportasi jalan sebesar 56,46%;
- c. peningkatan dukungan keselamatan dan keteraturan transportasi jalan sebesar 57,22%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan transportasi dan keselamatan jalan terus ditingkatkan, meskipun masih perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya.

### 3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program Pengelolaan Perkeretaapian mulai dilaksanakan pada tahun 2024 dengan capaian fasilitas keselamatan perlintasan kereta api sebesar 51,09%. Pada tahun 2025, capaian meningkat menjadi 78,81%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan indikator yang lebih difokuskan pada fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyediaan dan fungsi fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang sehingga mendukung pelayanan transportasi serta meningkatkan keselamatan masyarakat.

### 4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, capaian program tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Peningkatan terlihat pada pelayanan perhubungan, fasilitas keselamatan transportasi, dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan capaian pada beberapa indikator juga dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan indikator yang lebih menyesuaikan kondisi dan fungsi fasilitas di lapangan. Selain itu, upaya pengendalian lalu lintas dan peningkatan keselamatan transportasi menunjukkan hasil yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan, terutama penguatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi, keandalan infrastruktur perhubungan, keselamatan lalu lintas, serta penguatan tata kelola birokrasi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Darat

Upaya peningkatan pelayanan transportasi dilakukan melalui penguatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung

transportasi, serta optimalisasi pelayanan angkutan umum. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas layanan transportasi untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

## 2. Penguatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Untuk mendukung peningkatan manajemen dan pengendalian lalu lintas, Dinas Perhubungan melaksanakan pengaturan lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan, kegiatan patroli dan pengawasan lalu lintas, rekayasa lalu lintas pada ruas jalan tertentu, serta pengoperasian Area Traffic Control System (ATCS) guna meningkatkan kelancaran dan keselamatan perjalanan pengguna jalan.

## 3. Peningkatan Keandalan Infrastruktur Perhubungan

Keandalan layanan infrastruktur perhubungan ditingkatkan melalui pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penggantian fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), guardrail, cermin tikung, serta fasilitas keselamatan jalan lainnya agar tetap berfungsi secara optimal.

## 4. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Transportasi

Pemerataan akses layanan transportasi dilakukan melalui penyediaan dan pengembangan fasilitas pendukung transportasi yang menjangkau lebih banyak wilayah pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan nyaman.

## 5. Penguatan Keselamatan Transportasi Jalan

Berbagai langkah peningkatan keselamatan transportasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, pelajar, pengemudi angkutan umum, serta komunitas pengguna jalan. Selain itu dilakukan identifikasi dan penanganan lokasi rawan kecelakaan (blackspot) guna meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.

## 6. Optimalisasi Pengawasan Angkutan dan Operasional Transportasi

Dinas Perhubungan secara rutin melaksanakan pengawasan operasional angkutan umum dan angkutan barang, termasuk kegiatan ramp check kendaraan untuk memastikan aspek keselamatan, kelayakan teknis kendaraan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

## 7. Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Dalam mendukung Program Pengelolaan Perkeretaapian, dilakukan pemasangan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang kereta

api, termasuk rambu peringatan, marka jalan, dan fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

#### 8. Penguatan Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik, dilakukan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program, serta penerapan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.

#### 9. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara berkala untuk memastikan target kinerja dapat tercapai tepat waktu. Hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

### 3.1.3 Analisis Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

**Tabel 7** Capaian Realiasi PK dan Tingkat Kemajuan Sasaran Strategis Sesuai Target Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2025-2029	REALISASI PK 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Indeks Kualitas layanan transportasi darat	3,7446	3,3558	90%
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan	Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan	71,07%	61,68%	87%

		Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi	62,88%	52,40%	83%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	73,85	77,45	105%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Secara keseluruhan, realisasi kinerja hingga tahun 2025 menunjukkan progres yang positif dan on-track. Dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan, mayoritas indikator telah mencapai tingkat kemajuan di atas 80%, bahkan satu indikator telah melampaui target (105%).

Realisasi pada indeks reformasi birokrasi mencapai 77,45 dari target 73,85 (Tingkat kemajuan 105%). Hal ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi birokrasi dan tata kelola yang bersih telah berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Ini merupakan modal kuat bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Transportasi Darat Tingkat kemajuan berada di angka 90%. Meskipun belum mencapai target akhir Renstra, capaian ini menunjukkan bahwa standar pelayanan transportasi darat sudah mendekati kondisi ideal yang diharapkan pada akhir periode pembangunan.

Meskipun sudah berada di angka 80-an persen, kedua indikator ini memiliki tingkat kemajuan terendah dibanding yang lain. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan akses transportasi dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang perlu segera diakselerasi di tahun-tahun mendatang.

Pada Indikator Keandalan Infrastruktur (87%) dan Aksesibilitas Layanan (83%), Meskipun sudah berada di angka 80-an persen, kedua indikator ini memiliki tingkat kemajuan terendah dibanding yang lain. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan akses transportasi dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang perlu segera diakselerasi di tahun-tahun mendatang.

**Tabel 8** Analisis Capaian Realiasi PK dan Tingkat Kemajuan Sasaran Strategis Sesuai Target Renstra 2025-2029

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA 2025-2029</b>	<b>REALISASI PK 2025</b>	<b>TINGKAT KEMAJUAN</b>
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan perhubungan	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi baik	79.83%	78.81%	99%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan manajemen dan pengendalian lalu lintas	65.65%	44.88%	68%
			Persentase peningkatan kualitas prasarana dan keselamatan transportasi jalan	63.43%	56.46%	89%
			Persentase peningkatan dukungan keselamatan dan keteraturan transportasi jalan	62.14%	57.22%	92%

2	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	78.85	73.60	93%
---	---	---	--------------------------------------	-------	-------	-----

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang*

Secara umum, pencapaian indikator program menunjukkan tren yang sangat kuat, dengan rata-rata tingkat kemajuan di atas 90%. Namun, terdapat satu area spesifik pada manajemen lalu lintas yang membutuhkan perhatian khusus untuk diselaraskan dengan target Renstra.

Program Pengelolaan Perkeretaapian pada indikator Persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi baik dengan kemajuan capaian hingga 99% (Realisasi 78,81% dari target akhir 79,83%) ini hampir tuntas memenuhi target jangka menengah. Ini menunjukkan komitmen tinggi dalam menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Keberhasilan ini dapat dijadikan model efisiensi bagi program lainnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan tren positif dengan capaian: 93% (Realisasi 73,60 dari target akhir 78,85). Hal ini membuktikan bahwa manajemen birokrasi telah berjalan secara efektif dan transparan, mendekati target ideal yang ditetapkan dalam Renstra.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ) pada indikator program Persentase peningkatan kualitas prasarana dan keselamatan transportasi jalan dengan capaian kemajuan 92% sedangkan pada indikator program Persentase peningkatan dukungan keselamatan dan keteraturan transportasi jalan dengan capaian kemajuan 89%. Secara teknis, pengadaan prasarana dan dukungan keselamatan jalan sudah on-track. Namun pada indikator program Persentase peningkatan manajemen dan pengendalian lalu lintas hanya mencapai 68% (Realisasi 44,88% dari target akhir 65,65%), Ini merupakan indikator dengan capaian terendah. Dibutuhkan evaluasi apakah kendala disebabkan oleh faktor anggaran, regulasi, atau kompleksitas koordinasi di lapangan.

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melaksanakan berbagai upaya yang terarah dan berkelanjutan pada tahun 2025. Upaya tersebut difokuskan pada

peningkatan kualitas pelayanan transportasi, penguatan keselamatan lalu lintas, peningkatan aksesibilitas layanan, pengembangan infrastruktur perhubungan, serta penguatan tata kelola birokrasi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Penguatan Tata Kelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 105% dari target akhir Renstra didukung oleh berbagai upaya, antara lain:

- Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Digitalisasi administrasi dan pelayanan internal untuk meningkatkan efektivitas proses kerja.
- Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan penyederhanaan proses bisnis organisasi.
- Penguatan pengawasan internal, pengendalian gratifikasi, serta pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan pencapaian target organisasi.

#### 2. Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Darat

Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Layanan Transportasi Darat yang telah mencapai 90% dari target akhir Renstra, dilakukan upaya berupa:

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung transportasi darat.
- Optimalisasi pelayanan transportasi kepada masyarakat melalui peningkatan standar pelayanan.
- Penguatan pengawasan terhadap operasional angkutan umum dan angkutan barang.
- Pelaksanaan survei dan evaluasi kepuasan masyarakat sebagai dasar penyempurnaan layanan.
- Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan transportasi dalam rangka mendukung pelayanan yang aman, nyaman, dan tertib.

#### 3. Peningkatan Keandalan Infrastruktur Perhubungan

Capaian kemajuan sebesar 87% pada indikator keandalan infrastruktur perhubungan didukung melalui:

- Pemeliharaan rutin fasilitas perlengkapan jalan agar tetap berfungsi dengan baik.

- Pembangunan dan rehabilitasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), guardrail, dan fasilitas keselamatan lainnya.
- Inventarisasi serta evaluasi kondisi infrastruktur perhubungan secara berkala.
- Prioritisasi perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.
- Optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung keberlangsungan fungsi infrastruktur pelayanan transportasi.

#### 4. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Transportasi

Dalam mendukung capaian aksesibilitas layanan transportasi sebesar 83% dari target akhir Renstra, dilakukan berbagai upaya, yaitu:

- Pengembangan dan penyediaan fasilitas pendukung transportasi yang menjangkau lebih banyak wilayah pelayanan.
- Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui dukungan sarana dan prasarana transportasi.
- Identifikasi kebutuhan layanan transportasi masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan fasilitas.
- Penyediaan fasilitas transportasi yang mendukung kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### 5. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Keberhasilan mencapai tingkat kemajuan 92% pada indikator peningkatan kualitas prasarana dan keselamatan transportasi jalan didukung oleh:

- Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai standar keselamatan.
- Penanganan titik rawan kecelakaan lalu lintas melalui penyediaan fasilitas keselamatan jalan.
- Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan secara berkala.
- Edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, pelajar, dan pengguna jalan.

#### 6. Peningkatan Dukungan Keselamatan dan Keteraturan Transportasi Jalan

Untuk mencapai tingkat kemajuan 89%, dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

- Pengawasan dan penertiban operasional angkutan umum serta angkutan barang.
- Pelaksanaan ramp check kendaraan untuk memastikan kelayakan teknis dan keselamatan kendaraan.
- Pengaturan lalu lintas pada titik-titik strategis, kawasan pendidikan, pusat kegiatan masyarakat, dan lokasi rawan kemacetan.

- Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

#### 7. Peningkatan Manajemen dan Pengendalian Lalu Lintas

Meskipun menjadi indikator dengan capaian kemajuan terendah (68%), berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan manajemen dan pengendalian lalu lintas, antara lain:

- Pelaksanaan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan tertentu untuk mengurangi kepadatan kendaraan.
- Optimalisasi operasional Area Traffic Control System (ATCS) dan pemantauan lalu lintas berbasis teknologi.
- Pengumpulan dan analisis data lalu lintas sebagai dasar penyusunan kebijakan transportasi.
- Pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk dan saat pelaksanaan kegiatan masyarakat berskala besar.
- Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan lalu lintas dan transportasi.

#### 8. Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang Kereta Api

Keberhasilan capaian 99% terhadap target Renstra pada Program Pengelolaan Perkeretaapian didukung oleh:

- Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas keselamatan pada perlindungan sebidang kereta api.
- Pemasangan rambu peringatan, marka jalan, dan fasilitas pengamanan perlindungan.
- Monitoring kondisi fasilitas keselamatan perlindungan secara berkala.
- Koordinasi dengan pihak perkeretaapian dalam mendukung keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Propinsi/Nasional/Internasional

**Tabel 9** Perbandingan Capaian Realisasi Strategis Kinerja Kabupaten Jombang, Provinsi, dan Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
1	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Indeks Kualitas layanan transportasi darat	3,3558	-	-
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan	Persentase Kehandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan	61,68%	58,47%	-
		Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi	52,40%	77,41%	69,50%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	77,45	87,77%	-

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa antara capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dibandingkan dengan level Provinsi (Jawa Timur) dan Nasional dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Bidang Infrastruktur: Unggul dari Rata-Rata Provinsi

Pada indikator Persentase Kehandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan, Jombang mencatatkan angka 61,68%.Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang berada di angka 58,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas

infrastruktur transportasi di Jombang memiliki tingkat keandalan yang kompetitif dan berada di atas standar regional.

## 2. Bidang Aksesibilitas: Tantangan Signifikan

Pada indikator Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi, Jombang mencatatkan angka 52,40%. Angka ini masih jauh di bawah capaian Provinsi (77,41%) maupun Nasional (69,50%). Terdapat gap (selisih) sebesar 25,01% dibandingkan Provinsi. Hal ini mengindikasikan perlunya perluasan jangkauan transportasi publik atau kemudahan akses masyarakat menuju simpul-simpul transportasi di wilayah Jombang.

## 3. Tata Kelola Birokrasi: Perlu Akselerasi

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Jombang memperoleh nilai 77,45. Meskipun angka ini sudah masuk kategori baik, namun masih tertinggal jika dibandingkan dengan capaian Jawa Timur yang mencapai 87,77. Diperlukan langkah-langkah inovatif dan digitalisasi layanan yang lebih masif untuk mengejar ketertinggalan efektivitas birokrasi ini.

Dalam rangka meningkatkan daya saing kinerja sektor perhubungan serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada tahun 2025 telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang mengacu pada kondisi capaian daerah serta mempertimbangkan capaian tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur perhubungan, meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi, dan mempercepat reformasi birokrasi guna mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

### 1. Upaya Peningkatan Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan

Untuk mempertahankan capaian Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan sebesar 61,68%, yang telah melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 58,47%, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

- Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap perlengkapan jalan agar tetap berfungsi optimal.
- Melakukan rehabilitasi dan penggantian fasilitas perhubungan yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.
- Menambah dan melengkapi fasilitas keselamatan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, guardrail, cermin tikung, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).

- Melaksanakan inventarisasi dan pendataan kondisi fasilitas perhubungan secara berkala sebagai dasar perencanaan pemeliharaan dan pembangunan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat fungsi perlengkapan jalan untuk memastikan pelayanan infrastruktur tetap terjaga.
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran pemeliharaan sehingga fasilitas yang ada dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

## 2. Upaya Peningkatan Aksesibilitas Layanan Transportasi

Untuk meningkatkan capaian Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi sebesar 52,40%, serta mengurangi kesenjangan dengan capaian Provinsi Jawa Timur (77,41%) dan Nasional (69,50%), berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan identifikasi wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan transportasi.
- Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pendukung transportasi pada lokasi yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat tinggi.
- Meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung transportasi.
- Menyusun perencanaan kebutuhan infrastruktur transportasi berdasarkan hasil survei dan analisis kebutuhan masyarakat.
- Mengoptimalkan fungsi fasilitas transportasi yang telah tersedia agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pengembangan aksesibilitas transportasi.

## 3. Upaya Peningkatan Reformasi Birokrasi

Untuk meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,45 dan mendekati capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 87,77, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melaksanakan berbagai upaya, yaitu:

- Menguatkan implementasi Reformasi Birokrasi pada seluruh unit kerja.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi.
- Mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan pencapaian target organisasi.

- Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan publik.
- Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur guna meningkatkan efektivitas pelayanan.
- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
- Menguatkan pengawasan internal serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui berbagai upaya tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan capaian keandalan infrastruktur di atas rata-rata provinsi, sekaligus terus melakukan perbaikan pada aspek aksesibilitas layanan transportasi dan reformasi birokrasi guna memperkecil kesenjangan capaian dengan tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan

#### 1. Meningkatnya Pelayanan Perhubungan

Keberhasilan sasaran Strategis ini diukur melalui indikator Indeks Kualitas layanan transportasi darat dengan komponen pendukung Persentase Keandalan layanan Infrastruktur perhubungan dengan bobot 70% dan Persentase aksesibilitas layanan transportasi dengan bobot 30%.

**Tabel 10** Analisis Keberhasilan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN PENDUKUNG	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Indeks Kualitas layanan transportasi darat	Persentase Keandalan layanan Infrastruktur perhubungan x 70%	$3,4672 \times 70\%$ = 2,4270	$3,4672 \times 70\%$ = 2,4270
			Persentase aksesibilitas layanan transportasi x 30%	$3,0953 \times 30\%$ = 0,9286	$3,0958 \times 30\%$ = 0,9287
Total				3,3556	3,3558

*Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang*

Target dari indikator kinerja Indeks Kualitas Layanan Transportasi Darat tahun 2025 sebesar 3,3556 telah berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 3,3558. Keberhasilan ini didorong oleh kombinasi antara keandalan infrastruktur yang stabil dan peningkatan aksesibilitas layanan yang melampaui ekspektasi.

Keberhasilan ini disusun oleh dua pilar komponen pendukung dengan bobot yang berbeda, yang pertama yaitu Persentase Keandalan layanan Infrastruktur perhubungan yang tepat mencapai target realisasi 2,4270 (100%). Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan rutin infrastruktur perhubungan (seperti terminal, rambu, dan fasilitas jalan) tetap terjaga kualitasnya sesuai standar yang ditetapkan. Stabilitas di sektor ini menjadi fondasi utama pelayanan.

Komponen pendukung kedua yaitu Persentase aksesibilitas layanan transportasi yang sedikit melampaui target 0,9286 dengan realisasi 0,9287. Meskipun bobotnya lebih kecil, peningkatan aksesibilitas inilah yang menjadi "penentu" keberhasilan kita melampaui target total. Ini berarti masyarakat kini lebih mudah menjangkau layanan transportasi, baik dari sisi keterjangkauan jarak maupun kemudahan akses informasi layanan.

Upaya upaya yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya target kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sejumlah 2 unit.
2. Melakukan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sejumlah 1365 unit.
3. Melakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan sejumlah 6 unit.
4. Melakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sejumlah 320 unit.
5. Melakukan Revitalisasi Terminal Tipe C sejumlah 1 unit
6. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota sejumlah 12 laporan
7. Melakukan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sejumlah 6235 dokumen
8. Melakukan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji sejumlah 12 laporan

9. Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sejumlah 11 unit
  10. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota sejumlah 12 laporan
  11. Melakukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sejumlah 2 laporan
  12. Melakukan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sejumlah 2 laporan
  13. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 29 laporan
  14. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin sejumlah 8 laporan
  15. Melakukan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sejumlah 12 laporan
  16. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sejumlah 4 laporan
  17. Melakukan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sejumlah 13 unit
  18. Melakukan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sejumlah 1 dokumen
  19. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota sejumlah 3 laporan
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan

Dalam mencapai sasaran strategis ini diukur melalui 2 indikator, yaitu indikator yang pertama adalah Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan dengan komponen pendukung Persentase infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia dan berfungsi baik x 70% dan Persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi baik x 30%, indikator yang kedua yaitu Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi dengan

komponen pendukung Persentase kelancaran lalu lintas x 60% dan Persentase angkutan barang dan orang yang laik jalan x 40%.

**Tabel 11** Analisis Keberhasilan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN PENDUKUNG	TARGET 2025	REALISASI 2025	
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan	Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan	Persentase infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia dan berfungsi baik x 70%	54,34% x 70% = 38,04%	54,34% x 70% = 38,04%	
			Persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi baik x 30%	78,81% x 30% = 23,64%	78,81% x 30% = 23,64%	
		Total			61,68%	61,68%
		Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi	Persentase kelancaran lalu lintas x 60%	57,42% x 60% = 34,45%	57,42% x 60% = 34,45%	
			Persentase angkutan barang dan orang yang laik jalan x 40%	44,84% x 40% = 17,93%	44,86% x 40% = 17,94%	
		Total			52,38%	52,40%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Secara umum, kinerja layanan perhubungan tahun 2025 menunjukkan hasil yang Sangat Baik, di mana realisasi di lapangan telah memenuhi atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh beberapa komponen infrastruktur dan fasilitas operasional.

Pada indikator kinerja Persentase Kehandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan Indikator ini mengukur sejauh mana kesiapan infrastruktur fisik dalam mendukung transportasi dengan target dan realisasi total 61,68% yang artinya tercapai 100%. Pada komponen pendukung Persentase infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia dan berfungsi baik Berkontribusi sebesar 38,04%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jalan dan fasilitas pendukungnya telah berfungsi dengan stabil sesuai rencana. Pada komponen pendukung Persentase fasilitas keselamatan perlintasan jalur kereta api sebidang yang berfungsi baik Berkontribusi sebesar 23,64%. Fungsi alat keselamatan di perlintasan kereta api tetap terjaga sesuai standar keamanan.

Pada indikator kinerja Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi mengukur kemudahan dan kelancaran mobilisasi barang serta manusia dengan target 52,38% dan realisasi 52,40% (Melampaui Target). Pada komponen pendukung Persentase kelancaran lalu lintas realisasinya mencapai 34,45%, sesuai dengan target. Hal ini mencerminkan manajemen rekayasa lalu lintas yang efektif dalam menekan angka kemacetan. Pada komponen pendukung Persentase angkutan barang dan orang yang laik jalan Terdapat kenaikan positif dari target 17,93% menjadi 17,94%. Meskipun tipis, peningkatan ini menunjukkan adanya tren positif dalam pengawasan kelaikan kendaraan (uji KIR) dan kesadaran pemilik kendaraan terhadap aspek keselamatan jalan.

Dinas Perhubungan telah berhasil menjaga stabilitas infrastruktur (Kehandalan) dan meningkatkan kualitas mobilitas (Aksesibilitas). Keberhasilan melampaui target pada sektor kelaikan angkutan menjadi indikator kuat bahwa standar keselamatan transportasi di daerah kita terus membaik.

### 3. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif ini diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan komponen pendukung Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah x 10% dan Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah x 90%.

**Tabel 12** Analisis Keberhasilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN PENDUKUNG	TARGET 2025	REALISASI 2025
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah x 10%	51,0 x 10% = 5,10	65,3 x 10% = 6,53
			Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah x 90%	76,39 x 90% = 68,75	78,8 x 90% = 70,92
Total				73,85	77,45

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Secara keseluruhan, kinerja birokrasi pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan di atas target yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi 77,45 dari target total 73,85 yang artinya melampaui target (+3,60 poin). Capaian Indeks Reformasi Birokrasi ini ditopang oleh dua komponen utama.

Komponen pendukung pertama yaitu capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Bobot 10%) Komponen ini menilai efektivitas perencanaan dan langkah-langkah strategis yang diambil. Terdapat lonjakan performa yang sangat baik dari target 5,10 menjadi 6,53. Hal ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah administratif dan strategi awal yang disusun oleh Perangkat Daerah jauh lebih efektif dari yang diperkirakan.

Komponen pendukung kedua yaitu Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi (Bobot 90%) Komponen ini merupakan inti penilaian karena memiliki bobot terbesar, yang merefleksikan hasil nyata birokrasi di lapangan. Realisasi mencapai 70,92, melampaui target yang dipatok sebesar 68,75. Keberhasilan pada sektor ini menunjukkan bahwa reformasi bukan sekadar prosedur di atas kertas, melainkan sudah berdampak pada efektivitas kerja organisasi secara menyeluruh.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat daerah di dapat dari beberapa komponen sebagai berikut:

**Tabel 13** Capaian Komponen Pembentuk

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	4,60	6,53
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,00	1,25
	Rencana Aksi	4%	1,83	2,67
	Monitoring dan Evaluasi	4%	1,76	2,61
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	67,97	70,92
	Tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	38,80	39,50
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang Profesional	40%	29,18	31,42
<b>TOTAL</b>			<b>72,57</b>	<b>77,45</b>

Sumber data: Bagian Organisasi SetkdaKab. Jombang

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dari 72,57 pada tahun 2024 menjadi 77,45 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah mengalami perbaikan.

Pada komponen strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, seluruh sub komponen mengalami peningkatan. Pengelolaan Reformasi Birokrasi, rencana aksi, serta monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan Reformasi Birokrasi sudah berjalan lebih optimal.

Pada komponen sasaran strategis, capaian tata kelola pemerintahan digital dan budaya kerja ASN BerAKHLAK juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan pemerintahan berbasis digital, kerja sama, akuntabilitas, serta profesionalisme ASN.

Secara keseluruhan, capaian Reformasi Birokrasi tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dibanding tahun 2024. Namun demikian, pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta penguatan budaya kerja ASN masih perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan lebih baik.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi terdapat dalam tabel 14 sebagai berikut ini:

**Tabel 14** Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
		2024	2025			
A	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	4.60	6.53	- Sudah dilakukan penunjukan agen perubahan namun belum terlihat adanya kontribusi terhadap perubahan serta bukti pengelolaan agen perubahan sesuai dengan ketentuan - Kualitas rencana aksi kurang optimal, hanya berbasis pemenuhan dokumen, tidak terlihat adanya perbaikan rencana aksi yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta belum seluruh rencana aksi logis dan cukup jika dibandingkan dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan	- Libatkan Agen perubahan dalam mengawal perubahan organisasi dan didokumentasikan serta dilakukan monev capaian secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang - Melakukan perbaikan rencana aksi secara sungguh-sungguh melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini berikut indikator rencana aksi yang menggambarkan hasil/perubahan konkret agar cukup untuk mengungkap ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.	
B	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH					
I	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang					
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		80.35	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.		Bagian Organisasi
2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	3.00	4.00	Telah dibentuk Tim Kerja Baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan pengelolaan sistem kerja tersebut telah memanfaatkan	Segera melaksanakan reviu dan evaluasi SOP dan Proses Bisnis Perangkat Daerah dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan oleh Tim Kerja yang telah dibentuk dan dituangkan ke dalam dokumen resmi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
				aplikasi e-Kinerja BKN namun belum ditemukan adanya penyesuaian SOP dan Proses Bisnis (Probis) Perangkat Daerah yang menunjukkan adanya efisiensi dan efektivitas tim kerja tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah		
3	Indeks Penerapan SPBE	81.90	96.17			Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	96.63	85.24			BAPPEDA
5	Nilai SAKIP	77.80	73.60	Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada uraian c Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025	Bagian Organisasi
6	Tingkat Digitalisasi Layanan	100.00	4.00	Tingkat 4 — Orkestrasi Lintas-OPD  Catatan: Kepuasan yang sangat tinggi menunjukkan pengalaman pengguna lintas layanan yang lancar, standar yang konsisten, serta kepastian layanan pada skala antar-OPD.	Rekomendasi: 1. Mengukuhkan tata kelola One-Data melalui penetapan data steward, aturan mutu data, serta profil untuk layanan prioritas. 2. Membangun pusat integrasi (API gateway/ESB) dan penyeragaman nomor tiket lintas kanal (web, WA, loket). 3. Mengoperasionalkan observability (pemantauan SLA/SLI: latensi, tingkat kesalahan, ketersediaan) disertai sistem peringatan insiden. 4. Memformalkan manajemen perubahan (change management) agar perluasan fitur tidak menurunkan tingkat kepuasan.	Bagian Organisasi
7	Tingkat Pembangunan ZI	2.00	3.00	Telah melaksanakan perencanaan pembangunan pada 6 area perubahan Zona Integritas namun belum menggambarkan adanya monev yang menilai efektifitas realisasi rencana pembangunan	Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan serta melakukan pengutaan/perbaikan program secara berkelanjutan dengan berfokus pada penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021	Bagian Organisasi
8	Maturitas SPIP	3.24	0	Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah	Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten	Inspektorat

No	Indikator Kegiatan Utama	Nilai		Catatan	Rekomendasi	Pengampu Indikator
		2024	2025			
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	4.00	4.00	HASIL KERJA SUDAH BAIK	TINGKATKAN KINERJA YANG SUDAH BAIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.24	3.45	Jarang terjadi praktik korupsi	Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, serta menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel.	Bagian Organisasi
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	71.90	75.13	Catatan atas pengelolaan arsip Perangkat Daerah dapat dilihat pada Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025	Menindak lanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	75.00	95.00			Bagian Pengadaan Barang/Jasa
13	Indeks Pengelolaan Keuangan	91.83	96.13	Memuaskan	OK	BPKAD
14	Indeks Pengelolaan Aset	75.48	78.57	Komponen A (Prosesntase Ketepatan Perencanaan dengan Realisasi Pengadaan) Terdapat ketidaksesuaian antara rencana pengadaan pada RKBMD dengan realisasi belanja BMD  Komponen B (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan) Sudah sesuai  Komponen C (Kesesuaian Data Belanja Modal Pada Aplikasi Penatausahaan Aset Dengan Penatausahaan Keuangan) Sudah sesuai	KOMPONEN A Pastikan RKBMD selaras dengan RKA dan aset riil yang akan dibeli oleh perangkat daerah. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Perlu diperhatikan juga terkait Pemeliharaan BMD, yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi baik atau rusak ringan. Barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharaannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa dianggarkan belanja pemeliharaannya.  KOMPONEN B Laporan pengadaan bulanan telah disampaikan tepat waktu.	BPKAD

					KOMPONEN C Hasil entri pada aplikasi penatausahaan aset telah sesuai dengan data belanja modal.	
II	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	100.00	100.00			Inspektorat
A Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional						
1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	100.00	89.95	Pelaksanaan SKP memperoleh 0 dari 10, menunjukkan tidak adanya bukti pelaksanaan atau ketidaksesuaian data pendukung. Sementara itu, Pemberian Sanksi Pegawai sudah sangat baik dengan nilai 4,95 dari 5.	Perlu melengkapi bukti pelaksanaan kinerja dan memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi sesuai ketentuan. Aspek pemberian sanksi yang sudah baik perlu dipertahankan melalui konsistensi penerapan aturan.	BKPSDM
2	Indeks Profesionalitas ASN	75.35	84.81	Kecuali dimensi disiplin, prosentase pencapaian maksimal dari 3 dimensi lainnya masih relatif kecil.	Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi yang mempengaruhi predikat kinerja setiap pegawai, dan yang berpengaruh pada perolehan nilai dimensi kompetensi, dan diperlukan peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai jabatan masing-masing ASN, serta peningkatan kompetensi/diklat bagi ASN untuk penilaian tahun berikutnya.	BKPSDM
3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	2.00	63.45	Upaya internalisasi yang telah dilakukan belum efektif dalam menanamkan budaya kerja yang telah ditentukan. Pemahaman nilai hanya menjadi slogan atau administratif saja, tetapi konsistensi pelaksanaan belum terlihat merata di organisasi.	Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.	Bagian Organisasi
4	Indeks Pelayanan Publik	3.50	3.41	sesuai LHE	sesuai LHE	Bagian Organisasi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.91	86.07	untuk menyusun RTL dari 3 unsur terendah	segera melakukan Tindaklanjuti dari RTL yg ditetapkan	Bagian Organisasi

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab. Jombang

### 3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dikaitkan dengan Kinerja)

**Tabel 15.** Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Indeks Kualitas layanan transportasi darat	100%	51.986.291.543	49.756.624.693	95,71%
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Layanan Perhubungan	Persentase Keandalan Layanan Infrastruktur Perhubungan	100%	30.428.306.610	29.753.430.014	97,78%
		Persentase Aksesibilitas Layanan Transportasi	100%	5.473.366.022	5.376.066.101	98,22%
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	106%	16.084.618.911	14.627.128.578	90,94%

Terdapat Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki pagu anggaran sebesar Rp51.986.291.543,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp49.756.624.692,81 atau 95,71% dari total anggaran yang tersedia. Sementara itu, capaian kinerja yang dihasilkan mencapai 100%, yang berarti target kinerja yang telah ditetapkan berhasil dicapai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang tersedia telah dilaksanakan secara optimal dan efisien. Dengan tingkat penyerapan anggaran hanya

95,71%, organisasi tetap mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, serta pengendalian anggaran yang tepat sehingga setiap sumber daya yang digunakan mampu memberikan hasil yang maksimal.

Tingkat capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran menunjukkan bahwa output dan outcome yang dihasilkan tidak semata-mata bergantung pada besarnya anggaran yang terserap, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan sumber daya, koordinasi antarunit kerja, serta kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 dapat dikategorikan sangat efisien, karena dengan penggunaan anggaran sebesar 95,71%, instansi mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil, sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Jombang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantu di bidang perhubungan, yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan dibidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data diatas, maka secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 101,5%. Persentase capaian kinerja ini di dapat dari:

1. Capaian indikator Indeks kualitas layanan transportasi darat sebesar 100%
2. Capaian indikator persentase kehandalan layanan infrastruktur perhubungan 100%
3. Capaian persentase aksesabilitas layanan transportasi 100%
4. Capaian Indeks reformasi birokrasi 106%

Berdasarkan capaian tersebut, secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator utama berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi capaian melebihi target yang direncanakan.

Capaian pada indikator kualitas layanan transportasi darat, kehandalan infrastruktur perhubungan, dan aksesabilitas layanan transportasi menunjukkan bahwa pelayanan perhubungan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Selain itu, peningkatan capaian Reformasi Birokrasi menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik

#### **4.2 Upaya-upaya dimasa mendatang**

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan agar mencapai hasil yang maksimal maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memastikan keselarasan antara Dokumen perencanaan hingga ke pelaporan, menggunakan cascading kinerja (pohon kinerja) yang cermat sehingga setiap indikator dapat diturunkan sampai ke level pelaksana.
2. Berkomitmen agar senantiasa bekerja tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melaksanakan tugas secara konsisten sesuai target, serta melaporkan hasilnya secara jujur dan transparan.
3. Melakukan perencanaan dengan melibatkan masyarakat melalui musrenbang, maupun aspirasi masyarakat, melakukan verifikasi lapangan dan penentuan skala prioritas berdasarkan urgensi, jumlah penerima manfaat, dan kondisi eksisting.
4. Melakukan penyesuaian target di tahun berikutnya pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dikarenakan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan nilai 73,85 sudah tercapai pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 77,45.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun 2025. Laporan ini menjadi sarana evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja selama tahun berjalan. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan perhubungan yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Jombang.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JOMBANG**

